

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKTOR PARIWISATA BUDAYA DI KOTA CIMAHI

Cecep Ucu Rakhman

Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung  
Jl. Dr. Setiabudhi No.186 Kota Bandung, Jawa Barat

---

### Informasi Artikel

Dikirim: 28 Januari 2019  
Diterima: 12 Oktober 2019

---

### Korespondensi pada penulis:

Telepon:  
0817210100  
Email:  
[cecep.u.r@gmail.com](mailto:cecep.u.r@gmail.com)

### Abstract

*This research is a tourism culture study that aims to find out how community empowerment in the cultural tourism sector in the City of Cimahi is seen based on five dimensions of empowerment, namely enabling, strengthening, supporting, protecting, and foresting. The research method used is qualitative with data collection techniques using in-depth interviews, observation, documentation studies, and triangulation techniques. The emic analysis model and the analytical method are descriptive. From the results of research in the field it is known that community empowerment in the cultural tourism sector has been able to provide many benefits to the community in Cimahi City. In addition, community empowerment in the cultural tourism sector in the city of Cimahi that is studied based on the dimensions of enabling, strengthening, supporting, and protecting has also been going well. Only in a foresting dimension that has not been good. This is because community empowerment in the cultural tourism sector has not been based on strong commitment from all stakeholders.*

---

**Keywords:** Cimahi City; Community Empowerment; Cultural Tourism; Five Dimensions

---

### PENDAHULUAN

Salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai beberapa daya tarik wisata adalah Kota Cimahi. Kota ini terletak di sebelah barat Kota Bandung. Sebelum tahun 2017, pemberdayaan masyarakat terkait pengembangan pariwisata di Kota Cimahi belum ada yang menangani. Hal ini disebabkan karena peraturan daerah mengenai pembentukan Dinas kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudparpora) baru diundangkan pada 17 Oktober 2016. Dan baru pada awal tahun 2017 Disbudparpora ini dibentuk. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Cimahi pada tahun 2016 sebesar 2.307 orang dengan rincian 339 wisatawan mancanegara dan 2.307 wisatawan nusantara (<https://jabar.bps.go.id> diakses pada 17 Maret 2019).

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Cimahi Tahun 2014-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan bahwa visi kepariwisataan Kota Cimahi adalah menjadi destinasi pariwisata unggulan berbasis kreatif di tingkat nasional dan internasional berdasarkan potensi sumber daya Kota Cimahi dan sekitarnya. Sumber daya pariwisata yang dominan di Kota Cimahi adalah sumber daya wisata budaya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cimahi, Bapak Ero Kusnadi (9 April 2018) diketahui bahwa di Kota Cimahi ada 4 (empat) daya tarik wisata budaya yaitu Kampung Adat Cirendeui, Kampung Buyut Cipageran (Kabuci), Masjid Perahu Al Baakhirah, dan Kawasan Wisata Militer.

Pada akhir tahun 2017 Pemkot Cimahi melakukan *pre-launching Cimahi Heritage Tourism* dan pada April 2018 melakukan *launching*. Pada Desember 2018 Kota Cimahi membuka secara resmi destinasi wisata sejarah militer dan bangunan tua sebagai situs warisan budaya. Pemkot Cimahi melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga bekerjasama dengan TNI yang memiliki sebagian besar bangunan bersejarah untuk mengembangkan destinasi wisata *heritage* dan militer di Kota Cimahi. Di Kota Cimahi sendiri telah mempunyai suatu organisasi dari kelompok masyarakat yang merupakan komunitas pencinta sejarah dan bangunan tua Cimahi yang bernama *Tjimahi Heritage*. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sektor pariwisata budaya di Kota Cimahi yang dilihat dari 5 (lima) dimensi.

### **Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat**

Pariwisata berbasis masyarakat memiliki karakteristik, antara lain berskala kecil; dimiliki oleh anggota/kelompok masyarakat setempat sehingga memberikan manfaat pada masyarakat setempat; memberikan kesempatan kerja dan peluang ekonomi setempat; lokasi tersebar atau tidak terkonsentrasi di suatu tempat; disain dan kegiatan mencerminkan karakter wilayah setempat; mengedepankan kelestarian warisan budaya; tidak mematikan industri atau kegiatan lainnya dan bersifat saling melengkapi; menawarkan pengalaman yang berkualitas pada wisatawan; dan merupakan kegiatan usaha yang menguntungkan (Erawan, 2003:7).

Adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Kota Cimahi inilah yang coba digali, dipetakan dan dianalisis. Adanya keunikan fenomena pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata yang dijiwai nilai kearifan lokal di wilayah Kota Cimahi, mendorong peneliti mengembangkannya melalui suatu aktivitas penelitian ilmiah.

### **Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Pengertian pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin (Deliveri dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:76). Pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimalisasi daya (yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya dalam pengertian “kemampuan dan keberanian” maupun daya dalam arti “kekuasaan atau posisi tawar” (Mardikanto dan Soebiato, 2012: 113). Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah dan tidak berdaya karena masyarakat menganggapnya demikian (Seeman, Seligman, dan Learner dalam Suharto, 2010: 61). Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, serta kemampuan kultural dan politis (Suharto, 2010: 63-68).

### **Macam-macam Pemberdayaan**

Untuk menganalisis keberdayaan masyarakat digunakan 8 (delapan) indeks pemberdayaan (*empowerment index*). Ke-8 indeks itu sebagai berikut (1) kebebasan mobilitas; (2) kemampuan membeli komoditas kecil; (3) kemampuan membeli komoditas besar; (4) terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga; (5) kebebasan relatif dari dominasi keluarga; (6) kesadaran hukum dan politik; (7) keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, serta (8) jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga (Schuler, Hashemi, dan Riley dalam Suharto, 2010: 63).

Penulis menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya berdasarkan kelima dimensi yang dikaitkan dengan delapan indeks pemberdayaan dari Schuler, Hashemi dan Riley. Dalam penelitian ini, kedelapan indeks pemberdayaan disebut sebagai ciri-ciri dari lima dimensi (5P). Kedelapan ciri dari 5P yang digunakan dalam penelitian ini dirasakan kurang komprehensif dalam meneliti pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya di Kota Cimahi, sehingga diperlukan ciri-ciri lain. Oleh karena itu penulis berinisiatif membuat beberapa ciri tambahan, yaitu (1) adanya kesadaran pentingnya pariwisata; (2) adanya proses fasilitasi; (3) adanya keterlibatan dalam kegiatan pengembangan pariwisata; (4) adanya perlindungan terhadap

masyarakat lemah; (5) adanya kegiatan bimbingan dan dukungan, serta (6) adanya distribusi kekuasaan yang proporsional.

### **Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cimahi**

Pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya di Kota Cimahi dimulai dari pemberdayaan masyarakat secara umum. Dari pemberdayaan masyarakat secara umum tersebut juga ada pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata. Pemberdayaan masyarakat sektor pariwisata di Kota Cimahi mempunyai modal *tangible* dan *intangible* berupa sejarah, kearifan lokal dan bangunan tua yang mempunyai daya tarik wisata.

Pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata di Kota Cimahi dilandasi oleh kriteria dan prinsip dari etika utilitarianisme, yaitu bahwa pengembangan pariwisata harus mempunyai manfaat, dan pengembangan pariwisata juga harus mempunyai manfaat terbesar, serta pengembangan pariwisata harus mempunyai manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata di Kota Cimahi bermanfaat tidak hanya bagi sebagian kecil masyarakat, akan tetapi bermanfaat besar bagi mayoritas masyarakat di Kota Cimahi. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dengan menerapkan kebijakan pengembangan pariwisata budaya berbasis masyarakat.

### **METODE**

Pendekatan metode penelitian ini adalah kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus, di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswel, 2008: 19).

Desain penelitian berfokus pada peran dan pengalaman informan, serta cara mereka memandang implementasi kebijakan. Informan juga dapat menggambarkan fenomena yang terjadi, hubungan sebab akibat, kecenderungan, dan budaya yang berkembang dalam jejaring kelembagaan publik. Peneliti juga lebih menekankan pada objektivitas dan kejujuran yang diwujudkan dengan menjelaskan tujuan penelitian kepada informan. Jumlah informan yang diwawancarai ada 8 (delapan) orang. Ke-8 orang ini dipilih mewakili 5 (lima) pemangku kepentingan kepariwisataan yang biasa disebut dengan pentahelix. Unsur-unsur pentahelix terdiri dari *Academician*, *Businessman/woman*, *Community*, *Government*, *Media* yang bisa disingkat menjadi ABC-GM. Berikut adalah data para informan:

1. Sugeng Hermanto selaku Dosen Kepariwisata, mewakili dari sudut pandang akademisi kepariwisataan.
2. Iwan Setiawan selaku Ketua Dewan Seni Budaya (DSB) Cimahi dan Dosen Komunikasi Visual, mewakili dari sudut pandang akademisi kebudayaan.
3. Tetty Ariyani selaku pengusaha oleh-oleh Cimahi dari sudut pandang pengusaha/industri.
4. Machmud Mubarak selaku Ketua Komunitas Heritage Tjimahi, mewakili dari sudut pandang masyarakat/komunitas pariwisata budaya.
5. Wildan Tanoeatmadja selaku Ketua Bidang Pemasaran Komunitas Jasa Pariwisata Cimahi (Kojapaci), mewakili dari sudut pandang komunitas kepariwisataan.
6. Dede Syarif, selaku Ketua Lembaga Kesenian Cimahi (Lekci), Pengelola Sanggar Seni dan Film, mewakili dari sudut pandang komunitas kebudayaan.
7. Ero Kusnadi selaku Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cimahi, mewakili dari sudut pandang pemerintah.
8. Ririn Febriani selaku Wartawan Surat Kabar, mewakili dari sudut pandang media (jurnalis).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti ada 3 (tiga) macam, yaitu pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis data yang dikumpulkan. Proses analisis dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan, dilanjutkan dengan analisis data itu sendiri. Analisis dilakukan secara induktif sekaligus emik, pemahaman atas dasar hakikat data itu sendiri, sebagai data alamiah. Penggunaan teori dengan demikian juga didasarkan atas hakikat data, bukan sebaliknya. Instrumen analisis data secara keseluruhan sama dengan instrumen teknik pengumpulan data. Perbedaannya, dalam analisis yang berperan adalah keseluruhan hasil yang diperoleh melalui berbagai peralatan teknologi tersebut

(Ratna, 2010:511).

Untuk pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2012:330).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dimensi Pemungkinan

Dalam menganalisis dimensi pemungkinan menggunakan 3 (tiga) ciri, yaitu adanya kebebasan mobilitas; adanya kemampuan membeli komoditas kecil; dan adanya kesadaran pentingnya pariwisata. Banyak warga Kota Cimahi yang mencari nafkah (bekerja) di kota lain. Bahkan mayoritas anggota tim kelompok kerja yang merencanakan dan mengimplementasikan angkutan wisata Kota Bandung yang disebut Bandros (*Bandung Tour on The Bus*) yang merupakan bus tingkat yang disediakan oleh pemerintah Kota Bandung bagi wisatawan yang hendak berkeliling kota Bandung adalah warga Cimahi (Tanoeadmadja, wawancara, 28 April 2018). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kota Cimahi sudah memiliki kebebasan mobilitas.

Masyarakat Kota Cimahi sudah mempunyai tingkat kebebasan mobilitas yang tinggi karena dalam pengamatan penulis selama penelitian, mayoritas masyarakat Kota Cimahi sudah mampu pergi sendirian dalam kegiatan sehari-hari baik laki-laki maupun perempuan. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa beberapa warga di Kota Cimahi telah mampu melakukan mobilitas ke luar wilayah Kota Cimahi untuk melanjutkan pendidikan ke Kota Bandung dan ke Kabupaten Sumedang. Bahkan ada yang melanjutkan pendidikan dan bekerja sampai ke luar negeri. Selain itu juga ada sebagian para ibu telah mampu bekerja di luar wilayah tempat tinggalnya. Kota Cimahi sebagai Kota Militer, sering didatangi oleh para TNI yang pindah tugas atau sedang menempuh pendidikan militer di sana. Bagi masyarakat yang terbiasa dengan pendatang (yang menetap atau hanya bekunjung sementara waktu/berwisata), budaya *makan ga makan yang penting ngumpul* tidak berpengaruh. Kecenderungan masyarakat Cimahi adalah mencari peluang kehidupan yang lebih baik. Adanya kebebasan mobilitas bagi masyarakat Kota Cimahi membuat mereka terbiasa melakukan perjalanan (merantau). Selain itu terbukanya akses pada kehidupan luar dan meningkatnya mobilitas warga serta terbukanya beragam mata pencaharian telah mendorong sikap konsumtif pada masyarakat, sehingga secara tidak langsung telah memunculkan persaingan antar individu masyarakat dan menimbulkan lapisan-lapisan sosial yang beragam pada masyarakat Cimahi.

Ciri lain dari pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya berdasarkan dimensi pemungkinan adalah mampu membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat Kota Cimahi sudah mampu membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, dan juga dapat membeli komoditas kecil atau barang-barang kebutuhan sehari-hari. Bahkan penulis banak menjumpai ibu-ibu yang mampu mandiri walaupun tanpa pasangan hidup (suami). Adanya kemampuan membeli komoditas kecil tanpa meminta ijin pasangannya membuat kecenderungan masyarakat Kota Cimahi menjadi konsumtif. Untuk masyarakat yang terlibat aktif dalam organisasi atau komunitas pengembangan pariwisata secara langsung di Kota Cimahi seperti Komunitas Tjimahi Heritage, Komunitas Jasa Pariwisata Cimahi (Kojapaci), Komunitas Pusat Oleh-oleh Cimahi (Poci), maupun organisasi yang mendukung pariwisata secara tidak langsung seperti Dewan Seni Budaya (DSB), Lembaga Kebudayaan Cimahi (Lekci), kesadaran pentingnya pariwisata sudah tertanam. Sadar wisata ini mencakup pemahaman akan tujuh unsur dari Sapta Pesona yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Sejak Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dibentuk pada awal 2017 maka terbentuk pula beberapa Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) di Kota Cimahi. Selain itu sosialisasi sadar wisata di Kota Cimahi semakin sering dilakukan sehingga semakin banyak warga Kota Cimahi yang sudah sadar akan pentingnya pariwisata (Kusnadi, wawancara 9 April 2018). Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk ciri dimensi pemungkinan dari pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya, sudah terpenuhi.

### Dimensi Penguatan

Dalam menganalisis dimensi penguatan, menggunakan 3 (tiga) ciri, yaitu adanya kemampuan membeli komoditas besar; adanya keterlibatan dalam pembuatan keputusan; adanya keterlibatan

dalam kegiatan pengembangan kepariwisataan. Pengertian dari adanya kemampuan membeli komoditas besar adalah adanya kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier bagi mereka, seperti lemari pakaian, TV, radio, majalah, dan pakaian. Poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri (Suharto, 2010: 64).

Penghasilan masyarakat dari mengelola usaha kuliner seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas Pusat Oleh-oleh Cimahi (Poci) sudah lebih dari mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini membuat masyarakat mempunyai kemampuan untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier (Ariyani, wawancara 28 April 2018). Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan untuk ciri pertama dimensi penguatan dari pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya, yaitu adanya kemampuan membeli komoditas besar sudah terpenuhi. Banyaknya komunitas pariwisata di Kota Cimahi mengakibatkan aktifnya masyarakat dalam berorganisasi dan keterlibatan dalam pembuatan keputusan. Dari ciri dalam dimensi penguatan ini, pengetahuan dan kemampuan masyarakat Kota Cimahi menjadi semakin baik dan mampu memecahkan masalah.

Kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka semakin tinggi, malah cenderung terlalu percaya diri (*overconfident*). Seperti yang dilakukan oleh pengurus Komunitas Tjimahi Heritage dengan percaya dirinya sejak mereka berdiri para tahun 2015 hingga sekarang, mereka sering mengadakan kegiatan jelajah/berwisata ke daya tarik wisata sejarah dan bangunan tua (*heritage*) tanpa meminta bayaran dari para peserta alias gratis. Informasi ini didapatkan dari hasil wawancara pada tanggal 28 April 2018 dengan Machmud Mubarak selaku Ketua Komunitas Tjimahi Heritage.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya akses pada aset produksi atau sumber produksi dan modal keterampilan atau potensi yang dimilikinya, maka dapat membuat komunitas tersebut bisa berdaya dan mandiri, tanpa harus ada intervensi dari pemerintah daerah. Mengamati pemberdayaan masyarakat sektor pariwisata di Kota Cimahi yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi lintas sektor dalam konteks pendayaan berupa bantuan modal usaha, pada umumnya diberikan kepada kelompok masyarakat (komunitas) yang sedang merintis sebuah kawasan wisata atau telah mengelola suatu kawasan wisata yang berbasis ekonomi produktif tapi kekurangan modal. Hal ini membuat komunitas tersebut mengajukan proposal bantuan modal pengelolaan kawasan wisata kepada pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan untuk dimensi penguatan dari pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya, sudah terpenuhi.

### **Dimensi Perlindungan**

Dalam menganalisis dimensi perlindungan menggunakan 3 (tiga) ciri, yaitu adanya kebebasan relatif dari dominasi keluarga; adanya kesadaran hukum dan politik; dan adanya perlindungan terhadap masyarakat lemah. Realitas yang terjadi di Kota Cimahi, ternyata masyarakat Cimahi sudah memiliki kesadaran dan kebebasan relatif dari dominasi keluarga. Masyarakat Kota Cimahi mampu melindungi diri mereka sendiri dari kelompok yang kuat dengan cara membentuk komunitas-komunitas dalam rangka pengembangan kepariwisataan.

Data yang menunjukkan adanya kebebasan relatif dari dominasi keluarga selain dari banyaknya komunitas yang ada di Kota Cimahi, juga dapat dilihat dari tingginya angka perceraian di wilayah Kota Cimahi. Ketika seorang suami atau istri memutuskan bercerai, maka berarti ia sudah mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya terlepas dari dominasi pasangan hidupnya. Adanya Kesadaran Hukum dan Politik menyebabkan sebagian besar masyarakat Kota Cimahi sudah mengetahui tentang hak dan kewajibannya terkait dengan hukum dan politik. Masyarakat Kota Cimahi juga sudah mempunyai kesadaran berpolitik dalam pengembangan pariwisata, yaitu dengan aktif terlibat dalam organisasi kepariwisataan. Dengan adanya pengembangan kepariwisataan di Cimahi, banyak komunitas masyarakat yang terbentuk, diantaranya adalah Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Cirendeu; Kompepar Cipageran; Kompepar Cihanjuang; Komunitas Tjimahi Heritage; dan Komunitas Jasa Pariwisata Cimahi (Kojapaci).

Animo masyarakat terlibat dalam organisasi masyarakat (komunitas) di satu sisi menunjukkan hal yang positif dengan sudah adanya kebebasan relatif dari dominasi keluarga dan adanya kesadaran hukum dan politik. Di sisi yang lain pendekatan yang beragam perlu dilakukan ketika melaksanakan

pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya, karena kesepakatan dengan satu komunitas pariwisata belum tentu dapat diterima oleh komunitas pariwisata yang lain. Selain itu dampak negatif dengan adanya kesadaran hukum dan politik yang tinggi, ternyata ada anggota masyarakat Cimahi yang bermanuver dan melakukan tindakan-tindakan yang menghambat pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya di Kota Cimahi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan untuk dimensi perlindungan dari pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya, sudah terpenuhi.

### **Dimensi Penyokongan**

Dalam menganalisis dimensi penyokongan menggunakan 3 (tiga) ciri, yang pertama adanya keterlibatan masyarakat dalam kampanye dan protes-protes terhadap sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat setempat (Schuler, Hashemi, dan Riley dalam Suharto, 2010: 63-64). Untuk yang kedua adalah adanya kegiatan bimbingan dan dukungan, serta yang ketiga adanya proses fasilitasi (Rakhman, 2014: 99).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyokongan memang ada dan adanya partisipasi masyarakat dirasakan saat adanya program pengembangan kepariwisataan dari pemerintah, terutama pemerintah pusat. Dan diharapkan walaupun program dari pemerintah pusat sudah tidak ada, kelompok masyarakat yang sudah berdaya dan mandiri dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lain yang belum berdaya. Selain itu pemerintah daerah harus dapat menjaga keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata budaya dengan memberikan bimbingan dan dukungan. Menurut Bapak Iwan Setiawan (wawancara 28 April 2018) selaku Ketua Dewan Seni Budaya Kota Cimahi bahwa di Cimahi sudah sering diadakan diskusi antara pemerintah dengan para pelaku seni budaya. Dimana dalam diskusi ini sering terjadi beda pendapat baik antara pemerintah dengan budayawan maupun antara para budayawan itu sendiri.

Adanya kegiatan bimbingan dan dukungan dalam pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan (Suharto, 2010: 67). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendukung dan memfasilitasi setiap investasi yang memungkinkan mendorong masyarakat dapat berkembang. Menurut Bapak Dede Syarif selaku Ketua Lembaga Kesenian Cimahi (wawancara 28 April 2018) bahwa saat ini sudah ada proses bimbingan dan dukungan kepada para generasi muda yang ingin menekuni seni dan budaya melalui sanggar-sanggar seni, yang salah satunya dikelola oleh Bapak Dede Syarif sendiri.

Proses fasilitasi merupakan fungsi yang berkaitan dengan pemberian motivasi dan kesempatan bagi masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan fungsi ini antara lain menjadi contoh (*role model*), melakukan mediasi, dan negosiasi, membangun konsensus bersama, serta manajemen sumber daya. Pengertian manajemen di sini mencakup pengkoordinasian, pensistematian, dan pengintegrasian. Belum termasuk atau bukan pengawasan dan penunjukkan. Sedangkan pengertian sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan klien dan pekerja sosial dalam proses pemecahan masalah (Suharto, 2010, 95). Menurut Bapak Ero Kusnadi (wawancara 9 April 2018), Pemerintah Kota Cimahi sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mengembangkan kepariwisataan Kota Cimahi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan untuk dimensi penyokongan dari pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya, sudah terpenuhi.

### **Dimensi Pemeliharaan**

Dalam menganalisis dimensi pemeliharaan menggunakan 2 (dua) ciri, yaitu adanya jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga; serta adanya distribusi kekuasaan yang proporsional antara berbagai kelompok. Pengertian dari adanya jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga adalah bahwa masyarakat memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya (Suharto, 2010: 66).

Berdasarkan teori, jika keberhasilan dekonstruksi dibarengi dengan fakta-fakta bahwa destinasi pariwisata benar-benar membawa makna positif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, maka tesis Brechin, Wells dan Brandin (dalam Prasiasa, 2013:114) yang menyatakan bahwa manfaat pariwisata selama ini lebih banyak berpihak kepada para pemilik modal yang umumnya berasal dari masyarakat di luar destinasi pariwisata akan dapat dipatahkan. Pada kenyataannya di Kota Cimahi, tesis Brechin,

Wells dan Brandin masih berlaku. Para pemilik modal besar dari luar Kota Cimahi yang lebih menguasai perekonomian, dengan membuka hotel, rumah makan besar (restoran), dan usaha perjalanan. Masyarakat Cimahi sendiri yang mempunyai modal terbatas hanya dapat menjual produk atau jasa dalam skala kecil, seperti menjual kerajinan tangan, membuka kios, warung makan kecil, dan pondok wisata (*homestay*).

Dari hasil penelitian yang memiliki kemampuan untuk membeli rumah, tanah, aset produktif lebih banyak orang dari luar Cimahi. Mayoritas masyarakat Cimahi tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah, tanah, aset produktif. Kalau pun ada masyarakat Cimahi yang memiliki rumah, tanah, aset produktif, sebagian besar adalah merupakan warisan dari orang tua atau usaha keluarga. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan untuk ciri pertama dari dimensi pemeliharaan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu adanya jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga belum terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini potensi yang dimiliki oleh masyarakat harus dipelihara dan dilestarikan keseimbangan berusaha secara berkesinambungan, agar masyarakat tidak kehilangan kesempatan usahanya. Selain itu pemeliharaan juga dapat dimaknai sebagai memelihara keseimbangan antara kebutuhan mengakses aset produktif dan ketersediaan aset produktif yang ada.

Dalam pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya dengan pendekatan dimensi pemeliharaan di Kota Cimahi, ketegasan pemerintah daerah diperlukan dalam menjaga kondisi tetap terjaga baik (kondusif). Adanya jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga. Di Kota Cimahi saat ini kondisi yang kondusif belum seimbang, karena potensi yang dimiliki masyarakat terjaga hanya ketika ada program dan kegiatan yang dibantu atau difasilitasi oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat. Selebihnya ketika tidak ada program dan kegiatan, pengembangan masyarakat cenderung stagnan. Hal ini termasuk ketika wisatawan ingin mengakses kebutuhan aset produktif, seperti pemandu wisata, di beberapa daya tarik wisata, tidak ada pemandunya, sehingga terkadang masyarakat yang bukan ahlinya yang menggantikannya.

Berdasarkan fakta yang terjadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Ero Kusnadi, Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Cimahi (Wawancara, 9 April 2018) sebagai *leading sector*, bahwa dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya di Kota Cimahi belum ada sebuah *grand design* secara terintegrasi dan komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemberdayaan masyarakat di Cimahi berjalan secara parsial atau belum sistemik, artinya perubahan sosial ekonomi masyarakat secara struktural belum optimal.

Bila dikaitkan dengan konsep pemberdayaan, bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat secara ekonomi, maka proses perubahan sosial secara struktural tersebut secara pasti mengarahkan masyarakat untuk mengakses simpul-simpul ekonomi dan memanfaatkannya secara optimal untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dengan demikian terjadilah sebuah perubahan sosial dalam masyarakat dari aspek ekonomi. Perubahan sosial dimaksud melibatkan masyarakat secara luas, tidak sebatas individu atau kelompok tertentu, maka untuk merancang dan mengarahkannya agar perubahan sosial yang diharapkan itu berjalan secara konsisten dan berkesinambungan, maka diperlukan kerja sama antara pemangku kepentingan. Sedangkan perubahan sosial melalui pendekatan aktor, artinya peran aktor menjadi sangat penting dalam membawa perubahan sosial. Sangat terlihat ego masing-masing instansi, sehingga tidak ada satu rancangan strategi yang integral, komprehensif, sistematis, dan terarah.

Realitas ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya dalam dimensi pemeliharaan belum memiliki *grand design* program pemberdayaan masyarakat yang terarah, yang memungkinkan masyarakat secara luas tidak berdaya di Cimahi dapat terlibat dalam program pemberdayaan atau dapat mengakses kegiatan-kegiatan yang membuat mereka berdaya.

Secara umum pemberdayaan masyarakat di Kota Cimahi sudah baik, tetapi proses pemberdayaan masyarakat dalam pariwisata budaya belum optimal, karena kurangnya disiplin dari masyarakat. Selain itu selama ini pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya lebih ditujukan kepada target kuantitas seperti berapa jumlah pendapatan asli daerah dari pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan, dan kurang memperhatikan kualitas seperti bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dilakukan.

Kota Cimahi mempunyai potensi pariwisata untuk dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat, tetapi pada kenyataannya pemberdayaan belum benar-benar terdistribusi ke berbagai kelompok sehingga pengembangan pariwisata budaya cenderung stagnan (Hermanto wawancara, 30

April 2018). Banyak pelaku seni budaya ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, namun yang aktif hanya kelompok tertentu saja. Kalaupun ada kelompok lain yang muncul seperti berebut jatah program. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan untuk dimensi pemeliharaan dari pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya, belum terpenuhi (Febriani, wawancara, 12 Mei 2018).

Berikut ini adalah tabel rangkuman hasil penelitian dari masing-masing dimensi.

**Tabel 1.** Rangkuman Hasil Penelitian

No.	Dimensi (Suharto, 2010; Wrihatnolo & Dwidjowojoto, 2007)	Hasil Penelitian
1	Pemungkinan	Sudah terpenuhi dengan ciri-ciri mayoritas warga Cimahi sudah mempunyai kebebasan mobilitas; mampu membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; mampu membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari; dan sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya kepariwisataan.
2	Penguatan	Sudah terpenuhi dengan ciri-ciri mayoritas warga Cimahi sudah mampu membeli komoditas besar, terlibat dalam pembuatan keputusan, dan terlibat dalam pengembangan kepariwisataan.
3	Perlindungan	Sudah terpenuhi dengan ciri-ciri adanya kebebasan relatif dari dominasi keluarga; adanya kesadaran hukum dan politik; serta adanya perlindungan terhadap masyarakat lemah.
4	Penyokongan	Sudah terpenuhi dengan ciri-ciri mayoritas warga Cimahi sudah adanya keterlibatan masyarakat dalam kampanye dan protes-protes; adanya kegiatan bimbingan dan dukungan; serta adanya proses fasilitasi.
5	Pemeliharaan	Ciri-ciri adanya jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga; serta adanya distribusi kekuasaan yang proporsional antara berbagai kelompok belum terpenuhi.

**Sumber:** Hasil Olahan Penulis, 2019

## KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya di Kota Cimahi yang dikaji berdasarkan dimensi kemungkinan, penguatan, perlindungan, dan penyokongan, telah berjalan dengan baik. Hanya dalam dimensi pemeliharaan yang belum baik. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya belum didasari oleh komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu fungsi hakiki dari pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata budaya di Kota Cimahi masih dilaksanakan secara parsial, karena lebih fokus pada fungsi pembangunan yang lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur daripada pembangunan melalui pendidikan dan pelatihan.

Kedepan diharapkan agar Pemerintah Kota Cimahi berkolaborasi dengan komunitas kepariwisataan dan dari para pelaku usaha untuk sama-sama melakukan pemberdayaan kepada masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan mengembangkan kepariwisataan di Kota Cimahi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang telah memfasilitasi sehingga terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adam, Abbas. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat di Sofifi Pasca Pembentukan Provinsi Maluku Utara*. Disertasi. Bandung: FISIP Unpad.
- Ariyani, Tetty. (2018). Pemilik Pusat Oleh-oleh Cimahi (Poci). Wakil Ketua Komunitas Jasa Usaha Pariwisata Kotra Cimahi (Kojapaci). *Wawancara*. Cimahi, 28 April 2018.

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Tingkat Penghunian Kamar Hotel Jawa Barat 2017*. Diakses melalui <https://jabar.bps.go.id> pada 17 Maret 2019
- Creswell, John W. *Research*. (2008). *Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Djajadiningrat, S.T., A Budimanta, A. Marzali, T., & Sugiarto, Saharudin. (2003). *Akses Peran Serta Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Erawan. (2003). *Menuju Pembangunan Pariwisata Bali yang Berkelanjutan*. Makalah pada Seminar Penilaian Dampak Krisis dan Koordinasi Respon atas Bom Bali. Kerjasama UNDP, USAID, dan World Bank. Denpasar, 20 Desember 2003.
- Febriani, Ririn. (2018). Media (jurnalis) Surat Kabar Harian Pikiran Rakyat yang berdomisili di Kota Cimahi. *Wawancara via email*. Cimahi, 12 Mei 2018.
- Guzmán, Tomás López., Osvaldo Borges, & Castillo-Canalejo, Ana María. (2011). *Community-Based Tourism in Cape Verde - a Case Study*. *Jurnal Tourism and Hospitality Management*, Vol. 17 No. 1: 35-44.
- Hermanto, Sugeng. (2018). Akademisi/Dosen Manajemen Destinasi Pariwisata STP Bandung yang berdomisili dari kecil di Kota Cimahi. *Wawancara*. Bandung, 30 April 2018.
- Kusnadi, Ero. (2018). Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Pemkot Cimahi. *Wawancara*. Cimahi, 9 April 2018.
- Mardikanto, Totok., & Soebianto, Poerwoko. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Mubarok, Machmud. (2018). Ketua Komunitas Tjimahi Heritage. Berdiri sejak Tahun 2015 atas dasar kecintaan terhadap bangunan tua yang bersejarah dan sejarah Kota Cimahi. *Wawancara*. Cimahi, 8 April 2018.
- Ndraha, Taliziduhu. (2005). *Kybernologi: Beberapa Konstruksi Utama*. Tangerang: Sirao, Credentia Center.
- Prasiasa, Dewa Putu Oka. (2013). *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Rakhman, Cecep Ucu. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pangandaran*. Disertasi. Bandung: FIB Unpad.
- Ramli. (2010). *Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Pantai Kota Makassar dengan Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP)*. *Jurnal*. Makassar: Universitas Negeri Makassar. Vol. 5 No. 3: 299- 318.
- Ratna, Nyoman Kutha. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiawan, Iwan. (2018). Akademisi/Dosen Desain Komunikasi Visual dan Ketua Dewan Seni Budaya Kota Cimahi. *Wawancara*. Cimahi, 28 April 2018.
- Soetomo. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika

Aditama.

Syarif, Dede. (2018). Pengelola Sanggar Seni dan Film. Pengurus Komunitas Jasa Usaha Pariwisata Kota Cimahi (Kojapaci). *Wawancara*. Cimahi, 28 April 2018.

Tanoeatmadja, Wildan. (2018). Staf Ahli Humas Pemprov Jawa Barat. Pengurus Bidang Pemasaran di Kojapaci. *Wawancara*. Cimahi, 28 April 2018.

Wrihatnolo, R. Randy & Dwidjowojoto, N Riant. (2007). *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.